



**PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUWANGI**
www.banyuwangikab.go.id

Peran Pemerintah Daerah dalam Pertumbuhan Ekonomi Daerah

**Exclusively presented by Samsudin, S.E., M.Si.
BPKAD KABUPATEN BANYUWANGI**



OUTLINE

1

Overview
Banyuwangi and
Policy
Framework

2

Pemerintah
Daerah sebagai
Fungsi Budgeter

3

Pemerintah Daerah
sebagai Regulator



Pemerintah
Daerah sebagai
Market Creator

4

Kinerja
Pembangunan
Daerah

5

Penutup

6

Overview Kabupaten Banyuwangi



01

Kondisi Geografis Kabupaten Banyuwangi

02

Sosial dan Kesejahteraan Rakyat

03

Visi dan Misi Pemerintah Daerah



Kondisi Geografis Banyuwangi

Terletak antara $7^{\circ} 43' - 8^{\circ} 46'$ Lintang Selatan dan $113^{\circ} 53' - 114^{\circ} 38'$ Bujur Timur

Berada diujung timur Pulau Jawa dengan batas-batas: 1) Utara: Kabupaten Situbondo; 2) Timur: Selat Bali; 3) Selatan: Samudera Hindia; dan 4) Barat: Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Jember

Terbagi atas 25 kecamatan, 189 desa dan 28 kelurahan, dan 836 dusun/lingkungan

Luas wilayah $5.782,50 \text{ km}^2$, yang merupakan kabupaten terluas di Provinsi Jawa Timur

Memiliki panjang garis pantai sekitar 175,8 km dan 10 buah pulau

Terbagi atas dataran tinggi yang menghasilkan produksi perkebunan, dataran rendah yang menghasilkan tanaman pangan, serta daerah garis pantai yang merupakan daerah penghasil berbagai biota laut.

Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat

2010

Jumlah penduduk 1.610.909 Jiwa.
Partisipasi angka kerja 70.24 %
Tingkat Pengangguran sebesar
3,92 %



2018

Jumlah penduduk 1.735.845
Jiwa. Partisipasi angka kerja
72.12 %Tingkat Pengangguran
sebesar 3,67 %

Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat

2010

Indeks Pendidikan
0,52

Indeks Kesehatan
0,76

PDRB
32,46

Inflasi
5,58



2018

Indeks Pendidikan
0,59

Indeks Kesehatan
0,77

PDRB
76.24

Inflasi
2,04

MENGAWAL AGENDA NAWA CITA



AGENDA PRIORITAS NAWA CITA

MENGHADIRKAN KEMBALI NEGARA UNTUK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN MEMBERIKAN RASA AMAN PADA SELURUH WARGA NEGARA,

PEMERINTAH SELALU HADIR DENGAN MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS, DAN TERPERCAYA.

MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN.

MEMPERKUAT KEHADIRAN NEGARA DALAM MELAKUKAN REFORMASI SISTEM DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BEBAS KORUPSI, BERMARTABAT DAN TERPERCAYA

MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA

MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS RAKYAT DAN DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL SEHINGGA BANGSA INDONESIA BISA MAJU DAN BANGKIT BERSAMA BANGSA-BANGSA ASIA LAINNYA.

MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGGERAKAN SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK.

MELAKUKAN REVOLUSI KARAKTER BANGSA,

MEMPORTEGUH KE-BHINNEKA-AN DAN MEMPERKUAT RESTORASI SOSIAL



PRIORITAS JAWA TIMUR

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN.

MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG INKLUSIF, MANDIRI, DAN BERDAYA SAING, BERBASIS AGROBISNIS/ AGROINDUSTRI, DAN INDUSTRIALISASI.

MENINGKATKAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN, DAN PENATAAN RUANG.

MENINGKATKAN REFORMASI BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK.

MENINGKATKAN KUALITAS KESALEHAN SOSIAL DAN HARMONI SOSIAL.



9 PRIORITAS BANYUWANGI

PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN YANG BERAKHLAK MULIA

PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS KESEHATAN

REVITALISASI PERTANIAN DENGAN BERBAGAI SUBSEKTOR TERUTAMA PERIKANAN DAN KELAUTAN, TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN

PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS KEARIFAN LOKAL

PENGUATAN UMKM DAN KOPERASI

PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR, PEMUKIMAN DAN PERUMAHAN RAKYAT

PEMBANGUNAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP

PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

PENINGKATAN KUALITAS BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK

TANTANGAN

SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN

Langkah cepat, multiplier efek luas



KETERBATASAN WAKTU

- Time frame RPJMD 5 tahun
- RKPD 1 tahun



KETERBATASAN SUMBER DAYA (SDM DAN ANGGARAN)

- Anggaran masih menggantungkan dana perimbangan (DAU, DAK)
- Jumlah dan Kualitas



KETERBATASAN KEWENANGAN

- 11 Kewenangan Pemerintah Kota ditarik ke Provinsi (UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)



PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

2 WAJIB PENDIDIKAN, KESEHATAN

3 UNGGULAN PERTANIAN, PARIWISATA, UMKM

4 PENUNJANG INFRASTRUKTUR, PERLINDUNGAN SOSIAL, LINGKUNGAN HIDUP, BIROKRASI



VISI

TERWUJUDNYA MASYARAKAT BANYUWANGI YANG
SEMAKIN SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERAKHLAK
MULIA MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMIAN
DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA"

Dijabarkan
dalam
5 MISI

9

TUJUAN

22

SASARAN

44

INDIKATOR SASARAN

MISI
01

SEJAHTERA (SDM)

MEWUJUDKAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS
PELAYANAN BIDANG PENDIDIKAN KESEHATAN
DAN KEBUTUHAN DASAR LAINNYA

MISI
02

MANDIRI (DAYA SAING)

MEWUJUDKAN DAYA SAING EKONOMI DAERAH
MELALUI PERTUMBUHAN EKONOMI YANG
BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN BERBASIS
POTENSI SDA DAN KEARIFAN LOKAL

MISI
03

PEREKONOMIAN (KESENJANGAN)

MENINGKATKAN KUANTITAS DAN KUALITAS
INFRASTRUKTUR FISIK, EKONOMI DAN
SOSIAL

MISI
04

SDM (PEMBERDAYAAN)

OPTIMALISASI SUMBERDAYA DAERAH BERBASIS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBANGU
NAN BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN
LINGKUNGAN

MISI
05

SUPRASTRUKTUR (KELEMBAGAAN)

MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG
BAIK DAN BERSIH (GOOD GOVERNANCE) SERTA
LAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS BERBA
SIS TEKNOLOGI INFORMASI

Pemerintah Daerah dalam Fungsi Budgeter



01

Optimalisasi Belanja Daerah

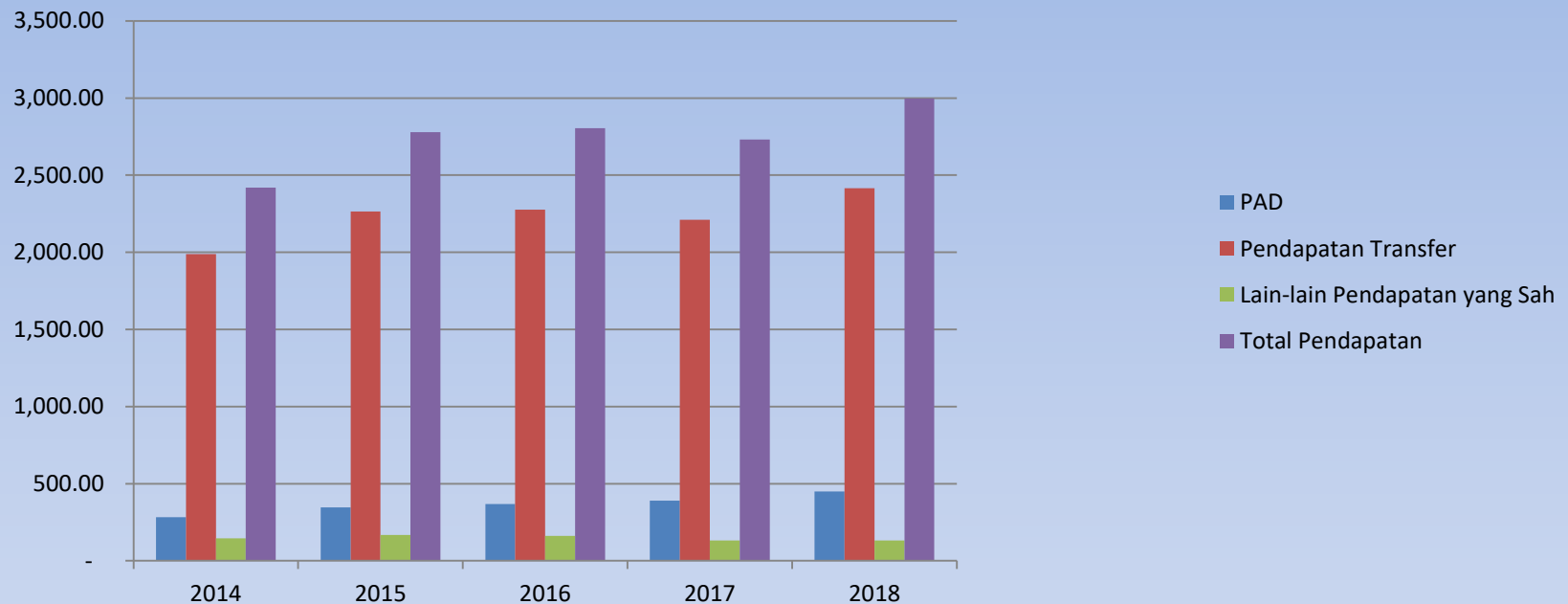
02

Kolaborasi APBD-APBDes

03

Inovasi Pemerintah Daerah

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2014-2018



Conclusion:

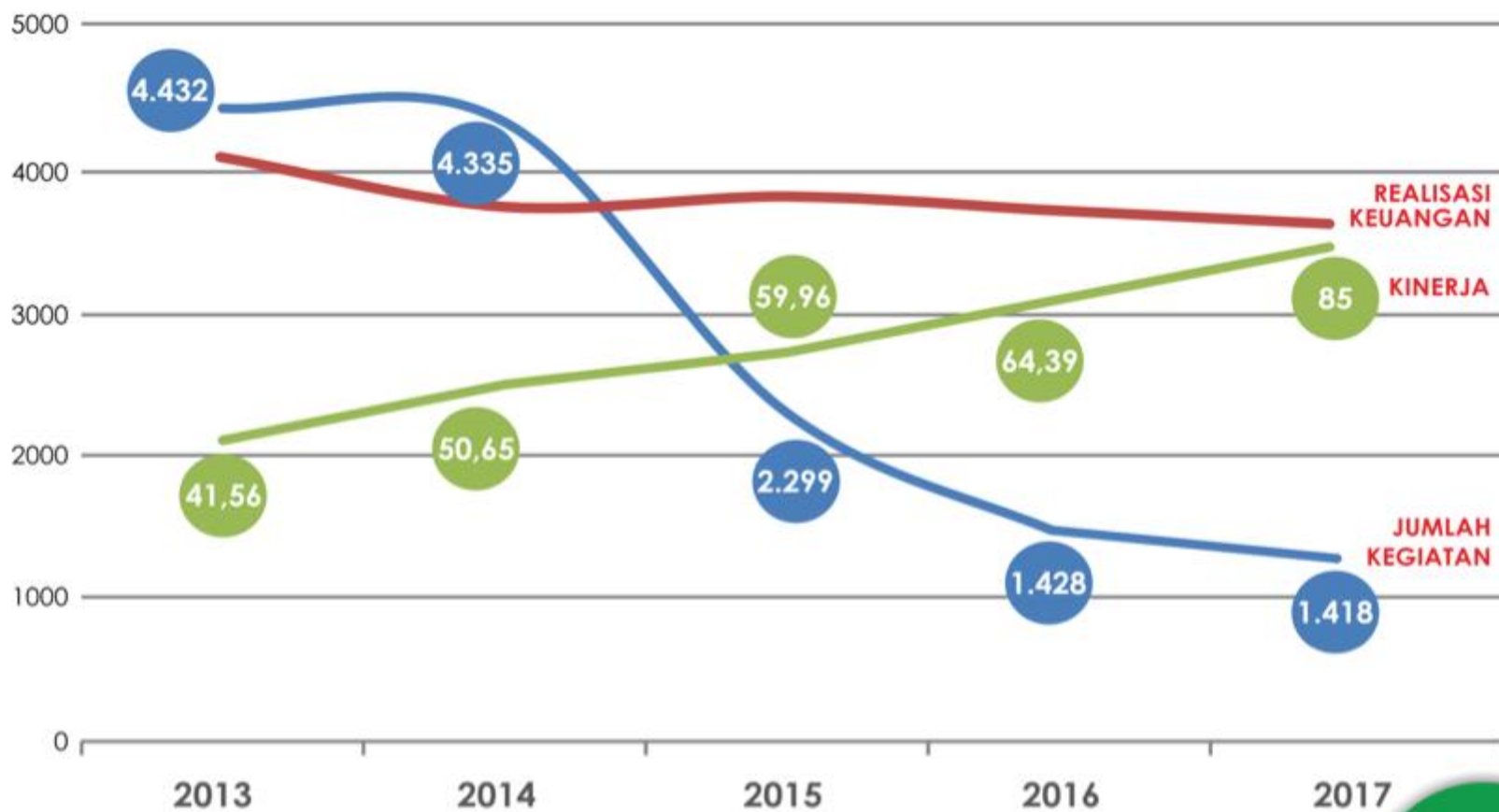
- ❖ Sumber pendapatan Pemkab Banyuwangi yang paling dominan berasal dari dana transfer.
- ❖ Pembiayaan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi masih bergantung pada transfer pemerintah pusat dan provinsi.

Realisasi Belanja Daerah Tahun 2014-2018





EFEKTIFITAS PENGUNAAN ANGGARAN

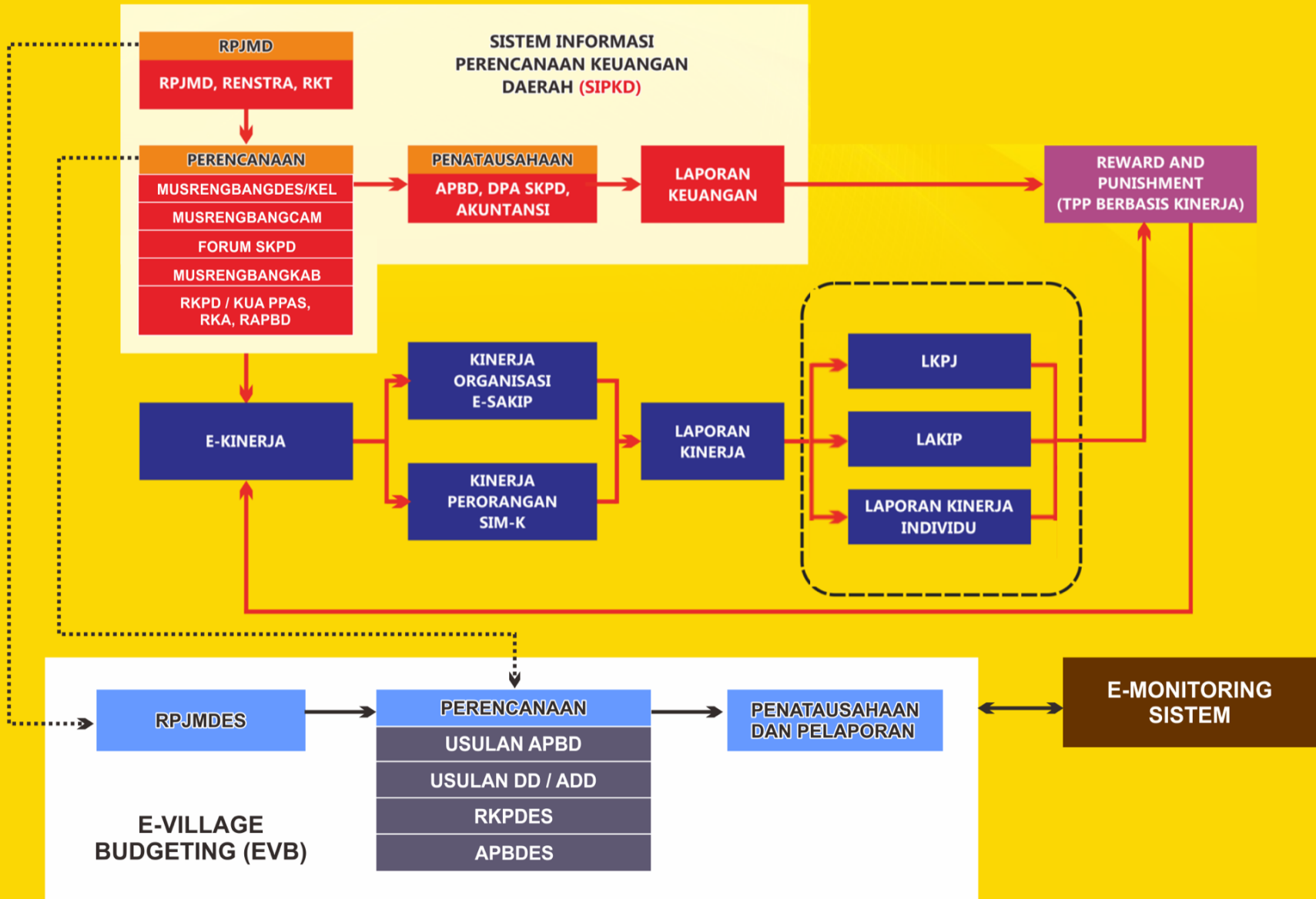


EFISIENSI
17,25%

Kolaborasi APBD–APBDDes

- Pemerintah melalui nawacita berkomitmen untuk melakukan pembangunan dari daerah pinggiran, di antaranya dengan meningkatkan pembangunan di desa.
- Terbatasnya kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan daerah memungkinkan adanya kolaborasi dengan APBDes dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
- Kolaborasi mulai dilakukan saat perencanaan, yaitu pada saat Musrenbangdes.

Kolaborasi APBD-APBDes



Inovasi Pemerintah Daerah

Berdasarkan Urusan yang Menjadi Kewenangan Daerah

BIDANG PENDIDIKAN

- Uang Saku Siswa Miskin
- Gerakan Daerah Angkat Anak Muda Putus Sekolah (GARDA AMPUH)
- Beasiswa Banyuwangi Cerdas
- Banyuwangi Mengajar
- Kampung e-Learning
- Siswa Asuh Sebaya

BIDANG KESEHATAN

- Puskesmas Jadi Mall Orang Sehat
- Jemput Bola Rawat Warga
- Gancang Aron

BIDANG SOSIAL

- Rantang Kasih
- Surat Pernyataan Miskin Online (SPM Online)

BIDANG PELAYANAN MASYARAKAT

- Smart Kampung
- Mall Pelayanan Publik
- Pasar Pelayanan Publik

Pemerintah Daerah Sebagai “Regulator”



Regulasi Pembatasan Pasar Modern dan Usaha Perhotelan



PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

Tujuan:

1. Mewujudkan Kabupaten Banyuwangi yang tertib, tentram, nyaman, bersih, dan indah.
2. Upaya pemerataan perekonomian daerah.
3. Upaya peningkatan pendapatan penduduk lokal.
4. Mempersempit gerak pasar modern.
5. Melindungi keberadaan pasar tradisional dan sektor usaha mikro lainnya.

Bentuk Pembatasan



Pasal 26 a

“ Setiap orang/badan dilarang mendirikan dan melakukan usaha baru berupa toko modern yang berjaringan/berwaralaba, kecuali toko modern yang tidak berjaringan dan toko modern terintegrasi langsung dengan fasilitas pendidikan atau rumah sakit atau hotel”

Upaya yang dilakukan Pemkab Banyuwangi dalam pembatasan pasar modern :

1. Mengangkat usaha mikro dengan menggandeng *startup* warung pintar.
2. Pasar modern harus menampung produk UMKM lokal.
3. Revitalisasi pasar tradisional berupa perbaikan infrastuktur dan tata ruang.
4. Mempersulit perijinan pendirian usaha dan bangunan.

Bentuk Pembatasan

Pasal 26 d

“Setiap orang atau badan dilarang mendirikan dan melakukan usaha perhotelan selain hotel bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5, hotel butik, homestay, dan dormitory.”

Hingga saat ini di Kabupaten Banyuwangi hanya terdapat puluhan hotel berbintang dan ratusan homestay serta dormitory.

Bentuk dukungan terhadap pembatasan pendirian hotel:

1. Larangan pendirian hotel disekitar kawasan wisata.
2. Menggandeng beberapa *platforms* untuk memperluas pemasaran homestay.
3. Meningkatkan edukasi terhadap masyarakat yang memiliki usaha homestay.

Pemerintah Daerah Sebagai *“Market Creator”*



Pemkab Banyuwangi sebagai *market creator* mempunyai peran dalam menciptakan pasar bagi masyarakat lokal, khususnya di sektor pariwisata. Strategi pemasaran terpadu yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi antara lain :

Penyelenggaraan Banyuwangi Festival

Melakukan Berbagai Inovasi Daerah

Pengembangan Destinasi Wisata Daerah



Banyuwangi Festival atau bisa disingkat dengan **B-Fest** adalah acara tahunan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten **Banyuwangi** sejak tahun 2012.



99
event

77
event

72
event

53
event

38
event

23
event

15
event

12
event



2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019



Inovasi Daerah Sebagai *Multiplier Effect* Pertumbuhan Ekonomi

INOVASI DAERAH

Pemkab Banyuwangi melakukan inovasi daerah guna mempermudah proses tata kelola pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

PENINGKATAN KUNJUNGAN KERJA

Inovasi yang telah dilakukan oleh Pemkab Banyuwangi banyak mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat, sehingga banyak daerah yang melakukan *study visit* untuk mempelajari atau mereplikasi.

PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN

Peningkatan kunjungan kerja akan berpengaruh pada perekonomian masyarakat Banyuwangi seiring dengan pemenuhan kebutuhan tamu selama di Banyuwangi.

Pengembangan Destinasi Wisata Daerah



Banyuwangi merupakan salah satu kota wisata terbaik di Indonesia, didukung dengan kekayaan wisata alam maupun wisata budaya menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor vital di Kabupaten Banyuwangi.



JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN

NUSANTARA

2012 : 860.021

2013 : 1.057.967

2014 : 1.363.530

2015 : 1.727.658

2016 : 4.022.449

2017 : 4.832.999



MANCANEGERA



2012 : 5.502

2013 : 10.462

2014 : 30.068

2015 : 45.569

2016 : 77.139

2017 : 98.970

TOTAL KUNJUNGAN
WISATAWAN 2017

4.931.969





❑ KOTA FESTIVAL TERBAIK DI INDONESIA

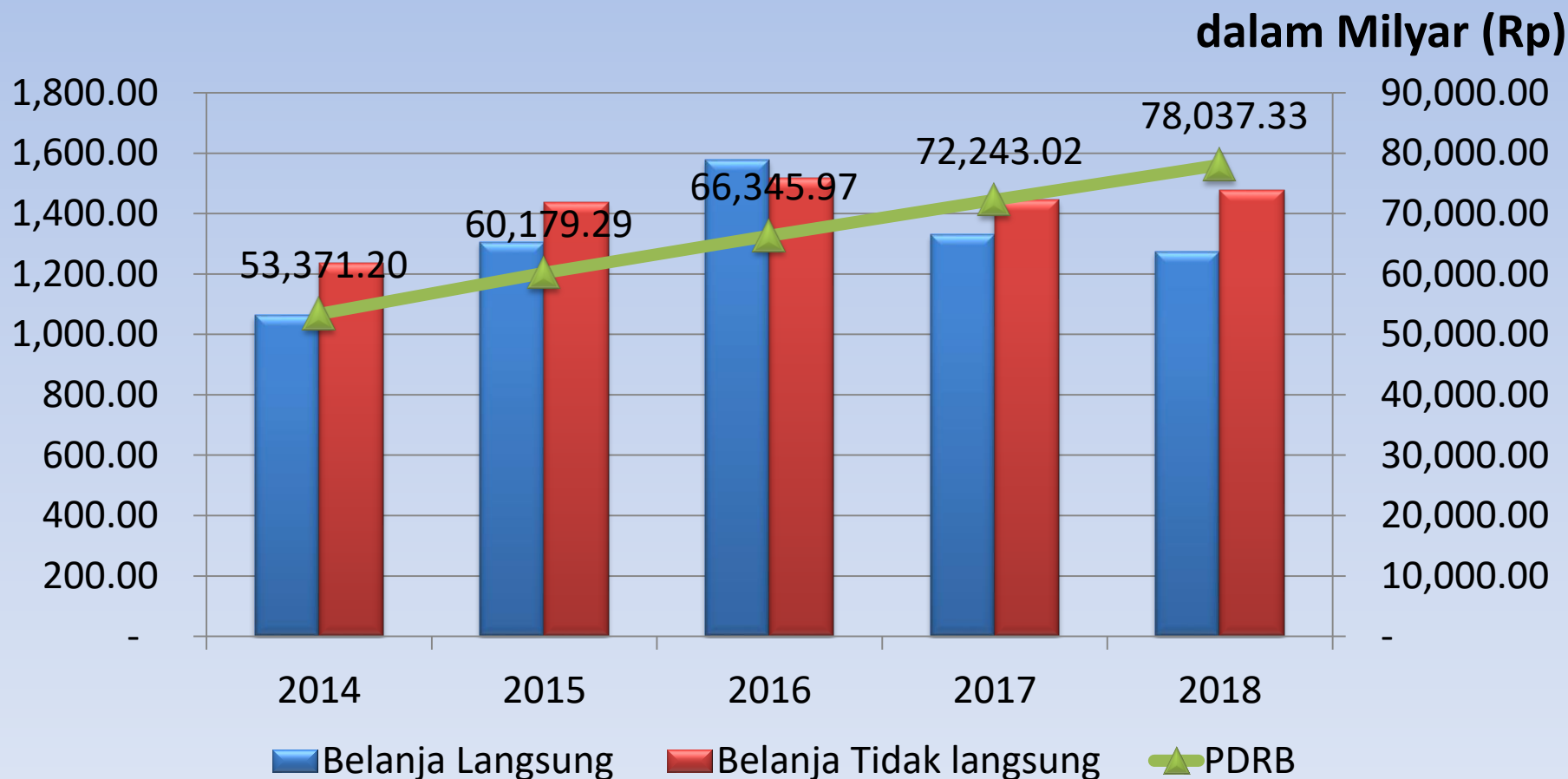
❑ KOTA TERBERSIH ASEAN DALAM
ASEAN TOURISM STANDART 2018

❑ UNWTO AWARDS TAHUN 2016 KATEGORI
INOVASI KEBIJAKAN PUBLIK DAN TATA KELOLA
PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Kinerja Pembangunan Daerah



Hubungan Realisasi Belanja Daerah dengan PDRB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014–2018





KINERJA

PERBANDINGAN SEBELUM 2010
DAN SESUDAH 2015

✗ AKSESIBILITAS ± 8 JAM
SURABAYA - BANYUWANGI

✗ AKSESIBILITAS ± 21 JAM
JAKARTA - BANYUWANGI

✗ IMAGE SEBAGAI
KOTA SANTET

✗ KOTA TERKOTOR
NOMOR 2 DI JATIM

✗ LAPORAN KEUANGAN
DISCLAIMER

✓ AKSESIBILITAS ± 45 MENIT
SURABAYA - BANYUWANGI

✓ AKSESIBILITAS ± 1,5 JAM
JAKARTA - BANYUWANGI

✓ IMAGE KOTA WISATA
UNWTO AWARD (MADRID, 2016)

✓ KOTA ADIPURA

✓ WTP MURNI 2012-2016
LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL

GINI RATIO 0,33 ↓ 0,29

PENGANGGURAN TERBUKA 6% ↓ 3,07%

KEMISKINAN 20,09% ↓ 8,64%

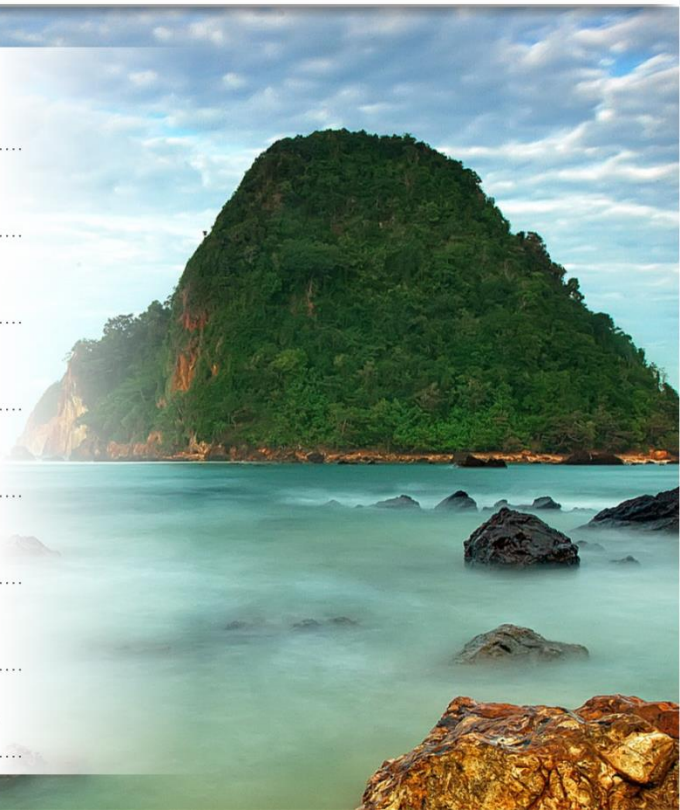
PDRB 32,46 T ↑ 66,34 T NAIK 104,4%

PENDAPATAN PER KAPITA 20,8 ↑ 41,467 NAIK 99,4%

PENUMPANG PESAWAT 7.835 ↑ 332.550 NAIK 4.144%

KUNJUNGAN WISMAN 12.500 ↑ 98.970 NAIK 691%

KUNJUNGAN WISNUS 45.000 ↑ 4.832.999 NAIK 10.639%



KINERJA BANYUWANGI

Pendapatan Per Kapita Rakyat



Melonjak
134%

Produk Domestik Regional Bruto



Melonjak
141,78%

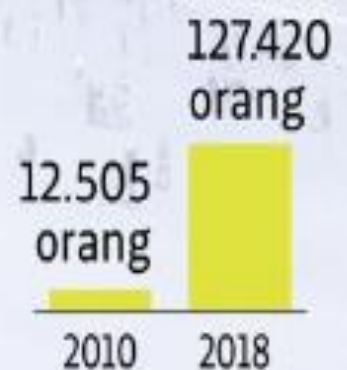
Kunjungan Wisatawan Domestik



Melonjak
960%

Berdasarkan
Data Tiket Destinasi, Hotel,
dan Agen Perjalanan Wisata

Kunjungan Wisatawan Mancanegara



Melonjak
919%

Berdasarkan
Data Tiket Destinasi, Hotel,
dan Agen Perjalanan Wisata



THANK YOU



wonderful
indonesia

